

Analisis Kompetensi Aparatur Terhadap Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di Desa Trimurjo

Darma Krisnanto¹, Nadia Anggraeni², Patricia Amanda Pertiwi³

Prodi Akuntansi Syariah Program S1, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung

Jl. Ki Hajar Dewantara No.15A, Iringmulyo, Kec. Metro Tim., Kota Metro, Lampung 34112

E-mail Korespondensi : wijdarma@gmail.com , nadiaanggraeni2328@gmail.com ,
Patriciaap650@gmail.com

Abstract. *The aim of this research is to see how the ability of village officials has an impact on the regional financial management system in Trimurjo Village, Central Lampung Regency. The involvement of the apparatus in question includes the knowledge, skills and attitudes needed to carry out their duties and responsibilities. This study is based on the theoretical framework of Spencer & Spencer (1993) and the principles of regional financial management according to Minister of Home Affairs Regulation No. 13 of 2006, emphasizes the importance of competency to ensure that village fund management runs well and efficiently. This research was conducted qualitatively, with data collected through interviews and literature study. The research results show that the competency of Trimurjo village officials in financial management still needs to be improved. The most significant factor is knowledge of the apparatus. This research proposes sustainable training and development to improve the quality of village financial management.*

Keywords: *Apparatus Competence, Regional Financial Management, apparatus involvement*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana kemampuan aparatur desa memberikan dampak pada sistem pengelolaan keuangan daerah di Desa Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah. Keterlibatan aparatur yang dimaksud mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Studi ini berdasarkan kerangka teori Spencer & Spencer (1993) dan prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006, menekankan pentingnya kompetensi untuk menjamin bahwa pengelolaan dana desa berjalan dengan baik dan efisien. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dengan data dikumpulkan melalui wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi aparatur desa Trimurjo dalam pengelolaan keuangan masih perlu ditingkatkan. Faktor yang paling signifikan adalah pengetahuan aparatur. Penelitian ini mengusulkan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa.

Kata kunci: Kompetensi Aparatur, Pengelolaan Keuangan Daerah, Keterlibatan Aparatur

LATAR BELAKANG

Dana desa merupakan suatu dana yang digunakan oleh pemerintah desa untuk melakukan pembangunan pada desa tersebut. Dalam pengelolaannya, harus ada pengawasan yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam berbagai kategori sehingga tercipta transparansi bagi masyarakat luas untuk dapat ikut serta dalam mengawasi proses pengelolaan tersebut. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan media yang dapat digunakan masyarakat untuk mengawasi serta mengamati pengelolaan dana desa. Dengan adanya keikutsertaan masyarakat dalam pengamatan ini, diharapkan penyelewengan dana pengembang desa dapat diminimalisir (Hindrayani dan Wati 2021).

Dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa diwajibkan untuk segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, yaitu semua hak dan kewajiban desa yang bernilai rupiah,

uang itu sendiri serta barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa (Njonjie, Nangoi, dan Gamaliel 2019a).

R. Palan dalam Komara (2019) mengemukakan pendapatnya tentang kompetensi yang merupakan deskripsi mengenai perilaku. Selanjutnya Komara (2019) menjelaskan bahwa kompetensi selalu berhubungan dengan manusia, tentang apa yang mereka lakukan dan bukan apa yang mereka angan-angankan. Dengan ini, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi memegang peran penting bagi jalanya suatu organisasi karena tanpa kompetensi suatu organisasi tidak akan berjalan.

Kompetensi merupakan salah satu faktor berkembangnya desa. Jika aparatur desa memiliki kompetensi yang bagus, maka dapat dipastikan bahwa desa mereka akan makmur. Sebaliknya, jika aparatur desa memiliki kompetensi yang buruk, maka perkembangan desa mereka akan terhambat. Hal tersebut tentunya menjadi tanggung jawab individu untuk dapat senantiasa menjaga kompetensi diri agar tetap berguna bagi masyarakat.

Desa Trimurjo merupakan desa yang berada di Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung. Pada Desa Trimurjo ini, pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh aparatur desa terbilang cukup buruk. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kepala desa maupun aparat desa untuk berbenah sehingga dapat mengelola keuangan desa dengan efisien. Kepala desa maupun aparat desa perlu meningkatkan kompetensi diri mereka sendiri sehingga masalah seperti pengelolaan keuangan yang buruk ini dapat dihindarkan di masa yang akan datang.

Uraian di atas menjadi tolak ukur bagaimana kompetensi dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan desa yang dikelola oleh aparatur desa. Faktor kompetensi dipilih dikarenakan kompetensi berkaitan langsung dengan kepribadian aparatur desa. Penelitian ini berfokus pada analisis pengaruh kompetensi aparatur pemerintah desa terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah di Desa Trimurjo.

Masalah yang terdapat pada uraian di atas menjadi landasan peneliti dalam melakukan penelitian berjudul **“Analisis Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Di Desa Trimurjo”**.

KAJIAN TEORITIS

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep kompetensi aparatur menurut Spencer & Spencer (1993) yang terdiri dari lima dimensi, yaitu motif, sifat, konsep diri, pengetahuan, dan keterampilan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori

pengelolaan keuangan daerah yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (Permendagri No. 13 Tahun 2006).

Sistem pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam tata kelola pemerintahan desa. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah di level desa tidak terlepas dari kompetensi aparatur pemerintah desa selaku pengelola. Kompetensi aparatur yang memadai dapat mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah di tingkat desa.

Kompetensi aparatur desa

Kompetensi aparatur desa adalah kemampuan yang dimiliki oleh perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Kompetensi aparatur desa mencakup tiga dimensi utama, yaitu:

a. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan informasi, fakta, konsep, dan prosedur yang dimiliki aparatur desa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pengetahuan mencakup pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, sistem pemerintahan desa, manajemen keuangan, teknologi informasi, dan isu-isu strategis terkait pembangunan desa.

b. Keterampilan (*Skill*)

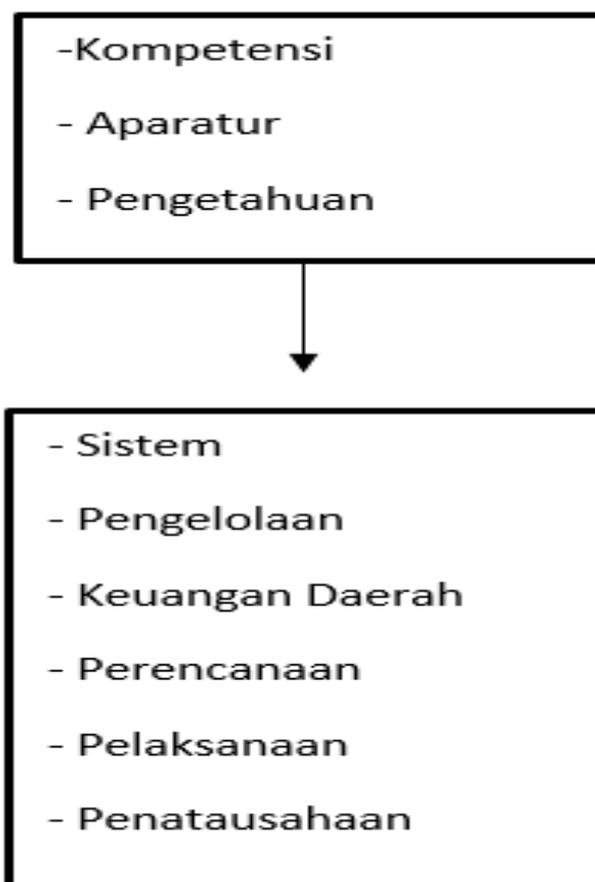
Keterampilan adalah kemampuan aparatur desa dalam menerapkan pengetahuan dan menggunakan alat serta teknologi untuk melaksanakan tugas-tugas secara efektif. Keterampilan mencakup aspek teknis seperti penyusunan perencanaan dan anggaran, manajemen proyek, penggunaan aplikasi digital, hingga kemampuan komunikasi dan kepemimpinan. (Sanusi, A. (2021) t.t.)

c. Sikap (*Attitude*)

Sikap merupakan perilaku, nilai, dan motivasi yang dimiliki aparatur desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sikap yang diharapkan antara lain integritas, komitmen, etos kerja, disiplin, orientasi pelayanan publik, dan tanggung jawab sosial (Robbins, SP, & Hakim, TA (2019) t.t.)

Pengelolaan Keuangan Daerah

Definisi pengelolaan keuangan daerah adalah Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah: Transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan keadilan. Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Kompetensi aparatur yang memadai dapat mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah di tingkat desa. Kompetensi aparatur yang rendah dapat menghambat kualitas pengelolaan keuangan daerah di tingkat desa.



Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat beberapa prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

- Akuntabilitas

Pengelolaan keuangan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan otoritas yang lebih tinggi.

- **Transparansi**

Pengelolaan keuangan daerah harus transparan dan terbuka kepada masyarakat.

- **Keadilan**

Pengelolaan keuangan daerah harus berkeadilan dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

- **Efisiensi**

Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efisien dan hemat.

- **Efektivitas**

Pengelolaan keuangan daerah harus mencapai tujuan dan sasaran.

- **Disiplin anggaran**

Pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemahaman terhadap regulasi dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Aparatur yang memahami regulasi dan prosedur pengelolaan keuangan daerah akan mampu mengimplementasikannya dengan baik.

Pemahaman ini mencakup pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan, pedoman, dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Kemampuan menyusun anggaran dan laporan keuangan sesuai standar. Aparatur yang kompeten akan mampu menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) berdasarkan kebutuhan riil dan sesuai dengan peraturan.

Selain itu, mereka juga akan mampu menyusun laporan keuangan daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Keterampilan dalam melakukan pencatatan, pembukuan, dan penatausahaan keuangan. Kompetensi aparatur dalam bidang akuntansi dan keuangan akan mempengaruhi kualitas pencatatan, pembukuan, dan penatausahaan keuangan daerah. Hal ini berkaitan dengan ketepatan, keakuratan, dan kelengkapan dokumentasi transaksi keuangan daerah.

Kemampuan melakukan analisis dan evaluasi kinerja keuangan. Aparatur yang kompeten akan mampu melakukan analisis dan evaluasi terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil analisis dan evaluasi ini akan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan strategis dalam

pengelolaan keuangan daerah. Integritas dalam mengelola keuangan secara jujur dan bertanggung jawab. Kompetensi aparatur tidak hanya terkait *hard skill*, tetapi juga *soft skill*, seperti integritas dan akuntabilitas. Aparatur yang memiliki integritas tinggi akan mengelola keuangan daerah secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang ditujukan untuk memahami berbagai macam fenomena yang dialami objek penelitian, seperti perilaku, tindakan, motivasi, dll yang secara deskriptif dijelaskan dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data primer, dimana peneliti menggunakan laporan keuangan desa yang kemudian dianalisis kembali untuk mengetahui kualitas laporan keuangan tersebut. Peneliti juga menggunakan metode wawancara untuk mengetahui lebih jelas tentang kompetensi, pengetahuan dan sikap aparatur desa berkaitan dengan laporan keuangan, yang kemudian akan dipakai dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompetensi aparatur desa Trimurjo dalam pengelolaan keuangan masih perlu ditingkatkan, setelah wawancara ditemukan kelemahan seperti pemahaman yang terbatas terhadap peraturan keuangan desa dan keterbatasan kemampuan akuntansi. Kompetensi aparatur desa yang terbatas berdampak pada pengelolaan keuangan desa Trimurjo yang kurang efektif dan akuntabel. Pemerintah Desa Trimurjo harus melakukan peningkatan kompetensi aparatur desa dengan pelatihan dan pengembangan kompetensi, bimbingan dan pendampingan teknis, penguatan system pengelolaan keuangan desa terutama dalam bidang pengelolaan keuangan, untuk mendukung tata kelola keuangan desa yang lebih baik.

Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di Desa Trimurjo

Analisis terhadap laporan keuangan desa mengungkapkan bahwa secara umum sistem pengelolaan keuangan daerah di Desa Trimurjo belum berjalan efektif dan akuntabel. Masih terdapat kelemahan, seperti belum optimalnya transparansi pengelolaan keuangan kepada masyarakat dan belum adanya partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan serta pertanggungjawaban keuangan desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kompetensi aparatur desa Trimurjo dalam pengelolaan keuangan desa masih perlu ditingkatkan. Hal ini berdampak pada pengelolaan keuangan desa yang kurang efektif dan akuntabel. Masyarakat berharap agar pemerintahan Desa Trimurjo melakukan upaya peningkatan kompetensi aparatur desa untuk mendukung tata kelola keuangan desa yang lebih baik dengan mengadakan pelatihan dan pengembangan pendidikan terkait pengelolaan keuangan desa.

Saran

Pemerintah daerah perlu meningkatkan kompetensi aparatur desa melalui program pelatihan, lokakarya, dan pengembangan sumber daya manusia yang focus pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap aparatur desa dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah desa harus memperkuat system pengelolaan keuangan daerah dengan menyusun prosedur dan mekanisme yang jelas, serta melakukan pengawasan dan pengendalian yang ketat terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, dan pemerintah di desa harus memfasilitasi pengembangan karir dan peningkatan kompetensi aparatur desa, sehingga mereka memiliki motivasi dan kesempatan untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas kinerjanya

DAFTAR REFERENSI

- Ando, Rahbila, Rusman Soleman, dan Kasim Sinen. 2024. "The Influence of Village Apparatus Competence, Community Participation, Organizational Commitment, Implementation of Village Financial Information Systems on Village Fund Management Accountability." 5(2).
- Arbain, Janu, Nur Azizah, dan Ika Novita Sari. 2017. "Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah Atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, Dan Mansour Fakih." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 11(1):75. doi: 10.21580/sa.v11i1.1447.
- Armelia, Putu Ayu, dan Made Arie Wahyuni. 2020. "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Efektivitas Pengendalian Internal Dan Moral Sensitivity Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa."
- Hartono, S. (2023). t.t. "Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Kompetensi Aparatur." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah* 15(1),1-15.
- Hindrayani, Ni Luh Putu, dan Ni Wayan Alit Erlina Wati. 2021. "Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa." *Hita Akuntansi dan Keuangan* 2(3):448–60. doi: 10.32795/hak.v2i3.1828.

- Islamiyah, Faridatul. 2020. “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak (Studi Empiris Pada Desa Sukoanyar, Desa Wajak, Desa Sukolilo, Desa Blayu dan Desa Patokpisis).”
- Komara, Endang. 2019. “Kompetensi Profesional Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) di Indonesia.” *MIMBAR PENDIDIKAN* 4(1):73–84. doi: 10.17509/mimbardik.v4i1.16971.
- Kurniawan,A. (2022). t.t. “Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.” *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 10(2),123-134.
- Mahmudi (2021). t.t. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo (2018). t.t. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Njonjie, Philep, Grace Nangoi, dan Hendrik Gamaliel. 2019a. “Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal dan Moralitas Aparatur Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Halmahera Utara.” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill”* 10(2):79. doi: 10.35800/jjs.v10i2.24955.
- Njonjie, Philep, Grace Nangoi, dan Hendrik Gamaliel. 2019b. “Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal dan Moralitas Aparatur Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Halmahera Utara.” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill”* 10(2):79. doi: 10.35800/jjs.v10i2.24955.
- Robbins,SP,& Hakim,TA (2019). t.t. *Perilaku Organisasi*. Edisi 18.
- Sanusi,A. (2021). t.t. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Veronika, Yuni, dan Yesi Mutia Basri. 2023. “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.” 19(2).
- Widyatama, Arif, Lola Novita, dan Diarespati Diarespati. 2017. “Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add).” *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 2(2). doi: 10.20473/baki.v2i2.4762.
- Zulkifl, Zulkifl, Sandrayati Sandrayati, dan Neni Ariani. 2021. “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim.” *JEMBATAN (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Auditing, dan Akuntansi)* 6(1):26–38. doi: 10.54077/jembatan.v6i1.55.